



Akses TPST Piyungan Diblokade

■ Warga Sekitar Jengah Dengan Persoalan Sampah

YOGYA, TRIBUN - Warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, melakukan aksi blokade akses masuk bagi truk-truk yang membawa sampah pada Jumat (18/12). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena terjadinya antrean panjang hingga 1 kilometer, truk-truk pembawa sampah karena TPST penuh.

Juru bicara warga sekitar TPST Piyungan, Maryono mengatakan, aksi protes sebagai keluhan warga atas kebijakan

Ini drainase sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Padahal, beberapa tanah sudah mulai longsor.

Maryono

● ke halaman 7

Akses TPST Piyungan

• Sambungan Hal 1

Pemda DIY dalam menangani permasalahan sampah. "Sebenarnya keluhan ini sudah disampaikan ke dinas terkait namun belum ada respons. Kami tunggu hingga 1 bulan ternyata tidak ada tanggapan. Akhirnya, kami lakukan penutupan akses masuk ke TPST per hari ini mulai pukul 07.00 WIB tadi (kemarin)," jelasnya kepada *Tribun Jogja*, Jumat (18/12).

Selain itu, tambah Mar-yono, kapasitas TPST Piyungan yang sudah melebihi kapasitas membuat sampah-sampah berserakan dan mengotori bahu jalan. Akibatnya, warga kesulitan dalam akses masuk dan keluar.

"Kami bukan tidak memperbolehkan membuang sampah di sini. Namun, seharusnya pemerintah juga paham untuk menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak. Sehingga, tidak terjadi tumpukan sampah yang mengganggu masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, warga juga mempersoalkan terkait drainase, *fogging*, penerangan

jalan, kebersihan, dan kompensasi. Ia mengatakan, tuntutan yang sudah disampaikan sejak dua tahun lalu, sampai sekarang belum direspons Pemda DIY. Padahal, kesehatan dan keselamatan warga menjadi ancamannya.

"Ini drainase sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Padahal, beberapa tanah sudah mulai longsor. Begitu pula, *fogging* tak pernah dilakukan sehingga banyak nyamuk dan lalat. Tiang-tiang lampu penerangan jalan pun tidak berguna. Hingga, hak kompensasi juga tidak kami terima," tuturnya.

Pihaknya, pun akan tetap menutup akses masuk ke TPST Piyungan hingga adanya respons serius dari Pemda DIY terkait penanganan sampah.

Tanggapan pemerintah

Aksi memblokir jalan utama ke TPST Piyungan, Bantul oleh warga bukan hanya persoalan sampah yang melebihi kapasitasnya. Namun, ada beberapa tuntutan masyarakat yang juga ingin disampaikan melalui aksi pemblokiran tersebut yakni, masalah drainase, melakukan *fogging*, penerangan jalan, kebersihan, dan kompensasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Pengolahan Sampah DLHK DIY, Fauzan mengatakan, pihaknya sudah melakukan kebijakan sesuai aturannya. "Kalau masalah drainase kan sudah ditangani oleh Dinas PUP ESDM dengan membangun talut. Untuk *fogging* juga rutin kami lakukan. Namun, hanya sekitar TPST Piyungan bukan ke rumah penduduk, aturannya seperti itu," terangnya kepada *Tribun Jogja*, kemarin.

Fauzan menambahkan, untuk masalah penerangan lampu pihaknya sudah konsultasi ke Dinas PUP-ESDM untuk diperbaiki. Karena, tak berfungsinya lampu jalan karena kabel putus akibat pembangunan yang dilakukan Dinas PUP ESDM. "Sudah kami sampaikan agar segera diperbaiki. Namun, kami juga kurang paham kenapa belum ada realisasinya," ucapnya.

Sedangkan, untuk masalah kebersihan, ia menilai sudah dilakukan. Namun, karena keadaan TPST Piyungan yang sudah penuh sehingga terlihat tak ada perubahan. Mekanisme pembayaran kompensasi pun sudah dipenuhi

pihaknya.

"Untuk kompensasi, mekanismenya tidak ada pembayaran memakai uang tunai. Hanya ada dua perjanjian kompensasi dengan masyarakat TPST Piyungan, yakni kompensasi kesehatan masyarakat dan kompensasi bantuan keuangan khusus (BKK)," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk kompensasi pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit Rajawali Citra di Jalan Pleret, Bantul agar masyarakat sekitar TPST Piyungan bisa berobat di sana.

Kemudian, kompensasi BKK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga misalnya terkait infrastruktur. Ada dua desa sekitar TPST Piyungan yang mendapat kompensasi BKK yaitu Desa Sitimulyo dan Desa Bawuran.

"Kalau kompensasi BKK, prosesnya dari pemerintah desa (kepala desa) mengajukan proposal ke tingkat provinsi terkait infrastruktur yang dibutuhkan. Nantinya, provinsi yang akan melakukan pengkajian. Beberapa waktu yang lalu sudah ada yang menggunakan kompensasi BKK untuk memperbaiki jalan," pungkasnya. (ndg/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005